

INDEKS TATAKELOLA PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU

Nurhamlin,

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

ABSTRAKS

Indonesia Governance Index (IGI) merupakan pengukuran kinerja tatakelola pemerintahan provinsi di Indonesia. Pengukuran dilakukan terhadap empat sektor pemerintahan (governance), yaitu: pemerintah (government), birokrasi (bureaucracy), masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat ekonomi (economic society). Keempat sektor tersebut diukur menggunakan enam parameter good governance, yaitu: partisipasi (participation), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), transparansi (transparency), efisiensi (efficiency) dan efektifitas (effectiveness). Dengan menggunakan metode statistik tertentu, penilaian terhadap sektor-sektor governance di atas, dituangkan dalam suatu indeks yang memungkinkan dibuat ranking governance provinsi Riau. Selain menggunakan data obyektif juga digunakan data persepsi dari Well Informed Persons (WIP) terutama informasi dari penyelenggaraan tatakelola pemerintahan di Riau.

Hasil peneltiian menyimpulkan bahwa indeks tatakelola pemerintahan Riau termasuk kategori cenderung baik (6,17) yang didukung oleh tatakelola birokrasi dan masyarakat sipil yang cenderung baik, namun masih dipengaruhi oleh arena pemerintah dan masyarakat ekonomi yang masih tergolong cukup.

Key word: *Good governance*

PENDAHLUAN

Latar Belakang Penelitian

Indonesia Governance Index (IGI) merupakan pengukuran kinerja tatakelola pemerintahan provinsi di Indonesia. Pengukuran dilakukan terhadap empat sektor pemerintahan (governance), yaitu: pemerintah (government), birokrasi (bureaucracy), masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat ekonomi (economic society). Keempat sektor tersebut diukur menggunakan enam parameter good governance, yaitu: partisipasi (participation), akuntabilitas



(*accountability*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), efisiensi (*efficiency*) dan efektifitas (*effectiveness*). Dengan menggunakan metode statistik tertentu, penilaian terhadap sektor-sektor *governance* di atas, dituangkan dalam suatu indeks yang memungkinkan dibuat ranking *governance* provinsi RIAU

IGI pertama kali diinisiasi oleh PARTNERSHIP pada tahun 2008 dengan nama Partnership Governance Index (PGI). Dengan PGI 2008, PARTNERSHIP melakukan pengukuran *governance* terhadap 33 provinsi di Indonesia dan menyusun rankingnya. PGI 2008 mendapatkan apresiasi yang bagus dari pemerintah dan perguruan tinggi, bahkan direkomendasikan sebagai perangkat monitoring terhadap pemerintahan provinsi. Metodologi yang digunakan dalam PGI 2008 bahkan sudah mendapatkan pengakuan dari UNDP Oslo Governance Center dan sudah diadopsi di beberapa negara Afrika, seperti Senegal dan sebagainya.

Berdasarkan hasil yang dicapai pada tahun 2008, maka pada tahun 2012 dilakukan penelitian untuk mengevaluasi tatakelola pemerintahan Provinsi Riau. Data dan hasil interview akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai tata-kelola pemerintahan provinsi Riau secara utuh dan disajikan dalam sebuah Index Governance yang mencerminkan kualitas pengelolaan provinsi Riau.

Tujuan

1. Mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai tata-kelola pemerintahan (*governance*) di provinsi Riau, termasuk mengenai perkembangan dan perbaikan kinerja tata-kelola pemerintahan di provinsi Riau .
2. Menyediakan sarana dialog yang berkualitas dan berbasis data antara para pengambil kebijakan dengan birokrasi dan masyarakatnya, sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki tata-kelola pemerintahan di tingkat provinsi Riau..
3. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan tentang kondisi tata-kelola pemerintahan provinsi Riau

Keluaran

Kegiatan ini berbentuk penelitian mengenai tata-kelola pemerintahan di provinsi Riau. Penelitian melibatkan peneliti dari Jurusan Sosiologi Fisip UR. Data sekunder diambil dari instansi-instansi pemerintah, birokrasi, lembaga-lembaga masyarakat sipil, bisnis dan media. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan penelitian yang berisi tentang tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.

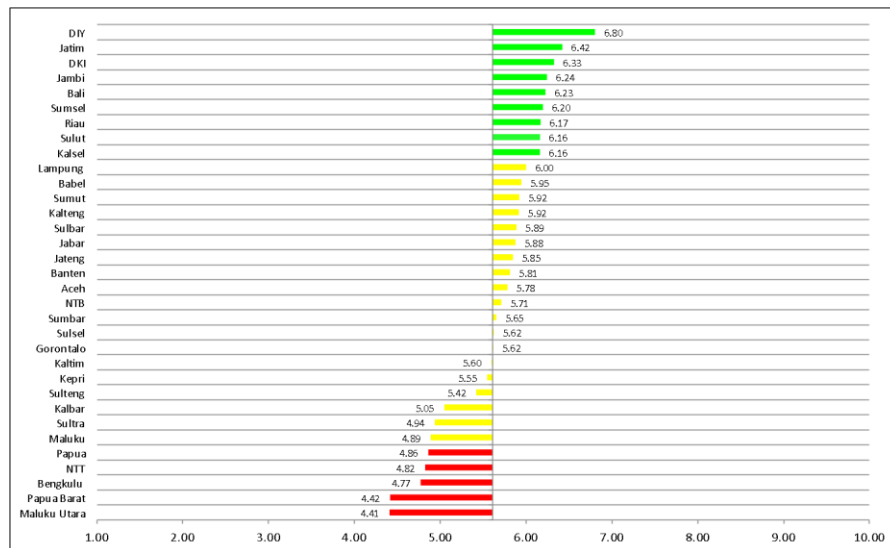
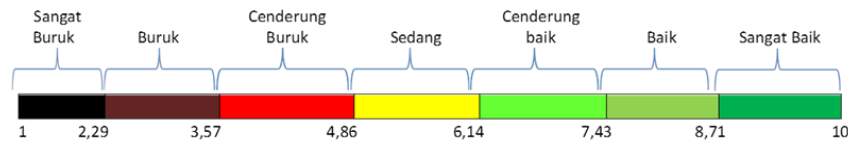
Metode Penelitian

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penyusunan indeks ini, yaitu jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner, penilaian peneliti dan diskusi kelompok. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pencatatan data dari dokumen-dokumen resmi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Analisa angka-angka indeks didasarkan pada *range* nilai berikut:



Gambar 2.1 Perbandingan Indeks Provinsi Riau dengan Rata-Rata Nasional

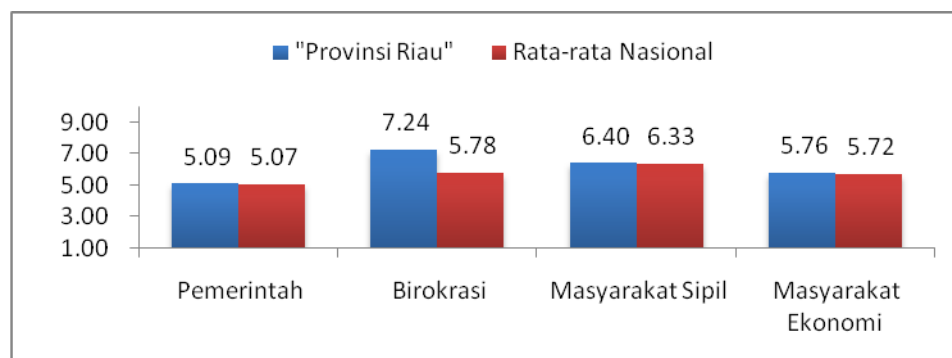
Berdasarkan gambar 2.1. di atas terlihat bahwa Riau secara nasional termasuk peringkat ke tujuh besar dalam hal tatakelola pemerintahan dengan indeks keseluruhan termasuk kategori cenderung baik dengan indeks 6.17. Peringkat pertama ditempati oleh DIY kemudian disusul oleh Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, Bali dan Sumatera Selatan. Provinsi Sulawesi Utara berada pada peringkat ke delapan dan Kalimantan Selatan pada urutan ke sembilan. Provinsi yang paling buruk tatakelola pemerintahannya adalah provinsi Maluku Utara dan Papua Barat, dengan indeks masing-masing 4.41. dan 4.42.

Untuk wilayah Sumatera, Riau termasuk urutan ke tiga setelah Jambi dan Sumatera Selatan, tatakelola pemerintahan yang paling buruk di wilayah Sumatera adalah Provinsi Bengkulu (indeks 4.77).

Indeks tata kelola pemerintahan Riau yang cenderung baik (indeks 6.17) tersebut disumbang oleh indeks birokrasi yang cenderung baik (7.24) dan indeks masyarakat sipil yang juga cenderung baik (6.40). Selain itu juga diperkuat oleh angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 13.98% per tahun dengan PDRB/Kapita mencapai Rp 44.154.993,13 yang merupakan angka tertinggi secara nasional. Bila dibandingkan dengan Provinsi DKI yang menempati urutan di bawah Riau, dengan kualitas tata kelola pemerintahan cenderung baik dengan indeks 6.16, ternyata PDRB/Kapita hanya Rp 43.283.728,00 dengan angka pertumbuhan ekonomi hanya 5.37%.

Arena yang masih mempengaruhi penampilan tata kelola pemerintahan Riau dengan kategori sedang adalah arena pemerintah (indeks 5.09). Angka ini merupakan angka terendah bila dibandingkan dengan arena masyarakat ekonomi termasuk kategori sedang dengan indeks 5.76. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh relatif sedikitnya alokasi anggaran pemerintah daerah Riau untuk kesehatan yang hanya sebesar Rp 34, 232 per kapita bandingkan dengan DKI yang PDRB/Kapita beda tipis dengan Riau, ternyata alokasi Anggaran Kesehatannya mencapai Rp 210,236.00 atau lebih dari 6 kali lipat anggaran kesehatan Riau. Demikian pula alokasi anggaran untuk penanggulangan Kemiskinan, walaupun diprogramkan dengan program K2I, ternyata alokasi anggaran untuk kemiskinan Riau hanya 93,110 per kapita sedangkan pemerintah DKI mengalokasikan untuk kemiskinan penduduk Jakarta sebesar Rp 1,484,496.60 per kapita. Kondisi serupa juga ditemui pada anggaran untuk pendidikan, Riau mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar Rp 174,294 . Angka ini masih dibawah Provinsi Jambi yang mencapai Rp 226,955.00, bahkan berbeda sangat signifikan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan di DKI Jakarta yang mencapai Rp 2,289,588.35 atau hampir 13 kali lipat anggaran pendidikan Riau.

Indeks tatakelola pemerintahan Provinsi Riau bila dibandingkan dengan rerata nasional dapat dilihat pada Gambar 2.2.

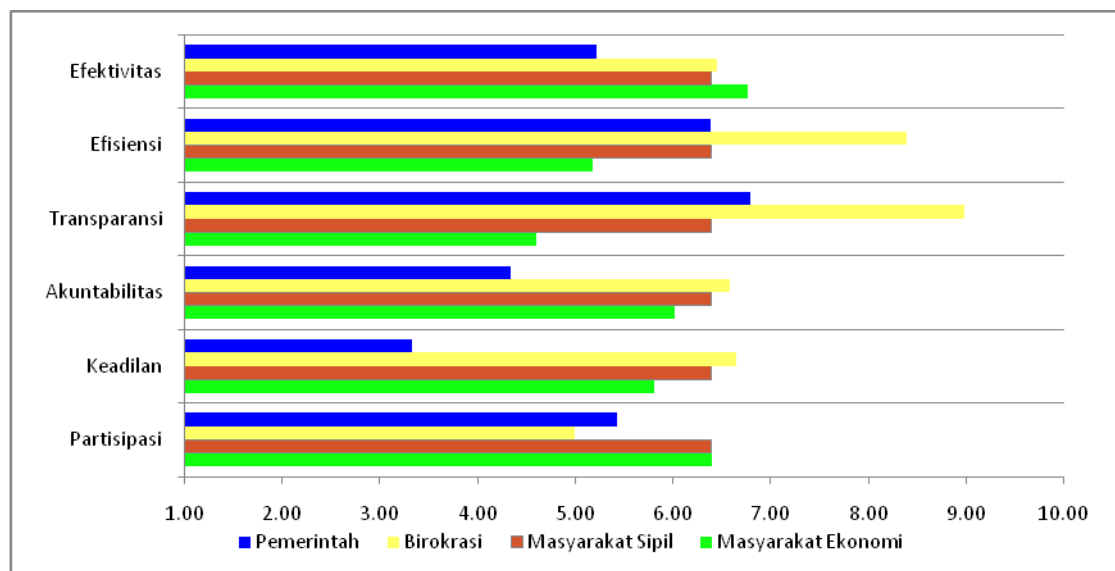


Gambar 2.2. Indeks Tatakelola Pemerintahan Riau dibandingkan Rerata Nasional

Berdasarkan Gambar 2.2. di atas terlihat bahwa arena yang mendongkrak posisi Riau menjadi urutan ke lima nasional dalam hal tatakelola pemerintahan

adalah arena birokrasi dan arena masyarakat sipil yang termasuk kategori cenderung baik dan sedang dengan indeksnya mencapai 7.24 dan 6. Angka ini ternyata di atas rerata nasional yang hanya 5.78 untuk arena birokrasi dan 6.33 untuk arena Masyarakat sipil. Akan tetapi di sisi lain arena pemerintah masih termasuk kategori cukup. Angka ini relatif sama dengan indeks rerata nasional pada arena yang sama. Begitu juga pada arena masyarakat ekonomi, walaupun masih termasuk kategori sedang dengan indeks 5.76 ternyata terpaut dengan rerata nasional yang hanya 5.72.

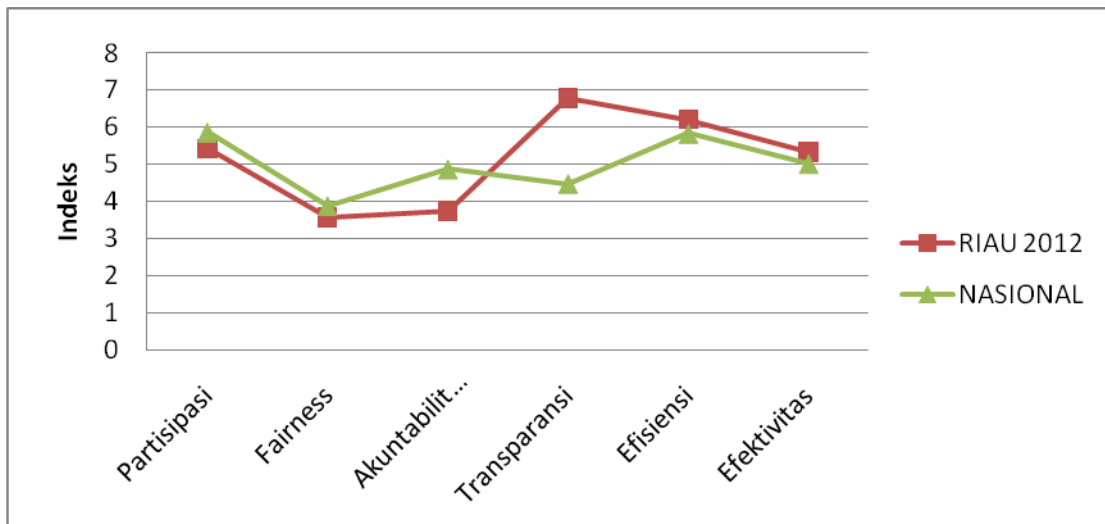
Indikator yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap tatakelola pemerintahan Riau yang cenderung baik adalah prinsip transparansi dan efisiensi di arena birokrasi. Kualitas transparansi termasuk kategori sangat baik, sedangkan tingkat efisiensi termasuk kategori baik, secara rinci hal ini dapat dilihat pada gambar 2.3. Adapun indikator yang memberikan kontribusi positif terhadap transparansi birokrasi adalah kemudahan akses publik terhadap dokumen keuangan SKPD serta terhadap regulasi investasi di Riau. Indikator yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi birokrasi adalah makin mudahnya pelayanan untuk investasi serta Rasio Belanja Aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) terhadap Realisasi PAD Provinsi Riau yang cenderung maskin besar.



Gambar 2.3. Indikator tatakelola pemerintahan Riau menurut Arena dan Prinsip

Analisis Level Arena

Pada level arena pemerintah, indikator transparansi, efisiensi dan efektivitas masih di atas rerata nasional, sedangkan indikator partisipasi, fairness dan akuntabilitas masih di bawah rerata nasional. Secara rinci indikator tatakelola pemerintahan pada Arena Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4. Indeks Arena Pemerintah Riau menurut Prinsip

Gambar 2.4. di atas memperlihatkan bahwa penampilan *good governance* di arena Pemerintah Riau termasuk kategori cukup dengan indeks 5.09 relatif tak berbeda jauh dengan indeks rerata nasional yang hanya 5.07. Indikator yang menyebabkan rendahnya indeks pemerintah Riau adalah fairnes dan akuntabilitas pemerintah itu sendiri yang indeksnya masing-masing hanya 3.33 dan 4.34 sebagaimana terungkap pada tabel 2.1. Rendahnya indeks fairnes pada arena pemerintah disebabkan karena kecilnya anggaran APBD untuk urusan wajib yakni:

- Anggaran bidang kesehatan per kapita penduduk, hanya Rp 34,232.06
- Anggaran bidang penanganan kemiskinan per kapita penduduk, hanya Rp 93,110.67
- Anggaran bidang pendidikan dibagi dengan jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun, hanya Rp 174,294.60

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan rerata nasional, dimana anggaran bidang kesehatan per kapita penduduk termasuk kategori buruk dengan indeksnya hanya 2.90, sedangkan indeks anggaran untuk bidang penanggulangan kemiskinan termasuk kategori cenderung buruk dengan indeks 3.91 sedangkan indeks anggaran untuk bidang pendidikan juga termasuk buruk dengan indeks 2.80, seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Fairnes di Arena Pemerintah

No	Indikator	Riau	Rerata Nasional

No	Indikator	Riau	Rerata Nasional
1.	Pelebagaan upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan	10.00	8.53
2.	Anggaran APBD untuk kesehatan (non belanja pegawai) perkapita (d disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi).	2.30	2.90
3.	Anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan perkapita (d disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi)	2.88	3.91
4.	Anggaran APBD bidang pendidikan dibagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun (d disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi)	2.47	2.80
5.	Persamaan kesempatan audiensi/interaksi antara berbagai kelompok masyarakat dengan Gubernur	6.40	6.43
6.	Jangkauan DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan secara merata (tidak diskriminatif)	4.60	5.42

Selain indikator fairnes, akuntabilitas pemerintah juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya indeks pemerintah. Adapun indikator akuntabilitas yang menyebabkan rendahnya indeks pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Target Capaian Prioritas RPJMD dengan Capaian Tahunan Pemerintah Provinsi dalam LKPJ
- b. Komitmen anggota DPRD memperjuangkan kepentingan/aspirasi publik
- c. Rasio Realisasi pengesahan perda dibandingkan dengan jumlah rencana legislasi daerah (dalam %) lihat Tabel 2.2

Tabel 2.2 Indikator Akuntabilitas di Arena Pemerintah

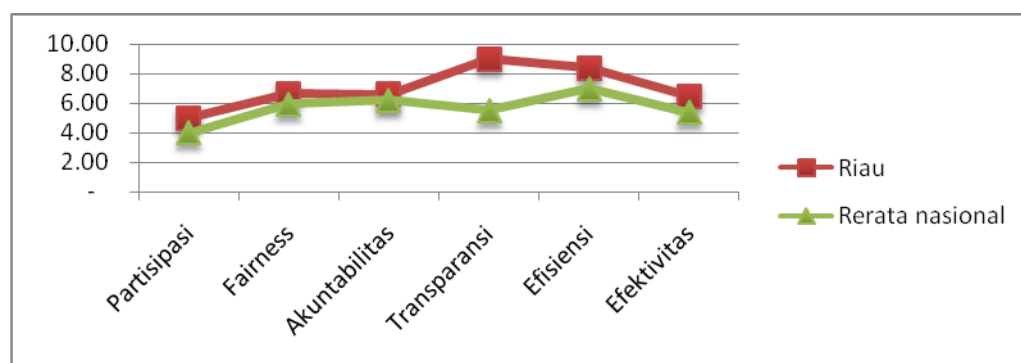
No	Indikator	Riau	Rerata Nasional
1.	Kesesuaian Target Capaian Prioritas RPJMD dengan Capaian Tahunan Pemerintah Provinsi dalam LKPJ	1.00	3.55
2.	Rasio Realisasi pengesahan perda dibandingkan dengan jumlah rencana legislasi daerah (dalam %)	4.68	5.36

3.	Rasio APBD Perubahan terhadap APBD Penetapan Tanpa Adanya Perubahan Asumsi Dasar	5.74	6.34
4.	Ketepatan waktu dalam pengesahan Perda APBD	7.00	6.91
5.	Rasio Belanja Hibah/Subsidi dan Bantuan Sosial terhadap Belanja Barang/Jasa dan Modal	8.28	8.04
6.	Komitmen anggota DPRD memperjuangkan kepentingan/aspirasi publik	4.60	5.36

Tabel 2.2. di atas memperlihatkan bahwa indeks rasio realisasi pengesahan Perda dibandingkan dengan jumlah rencana legislas daerah, termasuk cenderung buruk (4.68) sedangkan rerata nasional termasuk cukup (5.36). Kondisi ini disebabkan karena jumlah perda yang disahkan pada tahun 2011 hanya 9 buah perda (35%) dari 26 Ranperda yang termuat dalam proglegda tahun yang sama.

1) Arena Birokrasi

Arena birokrasi merupakan penyumbang terbesar terhadap penampilan tata kelola pemerintahan Riau. Indeks arena birokrasi termasuk kategori cenderung baik dengan indeks 7.24 berbeda signifikan dengan rerata nasional yang hanya tergolong cukup dengan indeks 5.78. Semua indikator tatakelola pemerintahan memiliki indeks di atas indeks rerata nasional, bahkan indikator transparansi mencapai taraf sangat baik indeks 8.99, begitu pula dengan indikator efisiensi. Indikator yang nilainya sedang adalah partisipasi (5.00), sekalipun indeks ini masih di atas rerata nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.5



Gambar 2.5. Indeks Arena Birokrasi Riau menurut Prinsip

Gambar 2.5. di atas memperlihatkan bahwa partisipasi merupakan prinsip yang memiliki indeks paling rendah dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang lain. Ada pun indikator yang menyebabkan rendahnya indeks partisipasi di arena birokrasi adalah ketersediaan unit pelayanan pengaduan masyarakat di bidang

kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pendidikan yang nilainya sangat buruk (indeks = 1.00). Hal ini juga didukung oleh hasil diskusi kelompok yang menyimpulkan bahwa di Riau belum ada unit pelayanan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pendidikan. Kondisi menyebabkan tidak terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) yang memadai terhadap ke tiga bidang tersebut. Secara rinci masing-masing indikator partisipasi di arena Birokrasi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

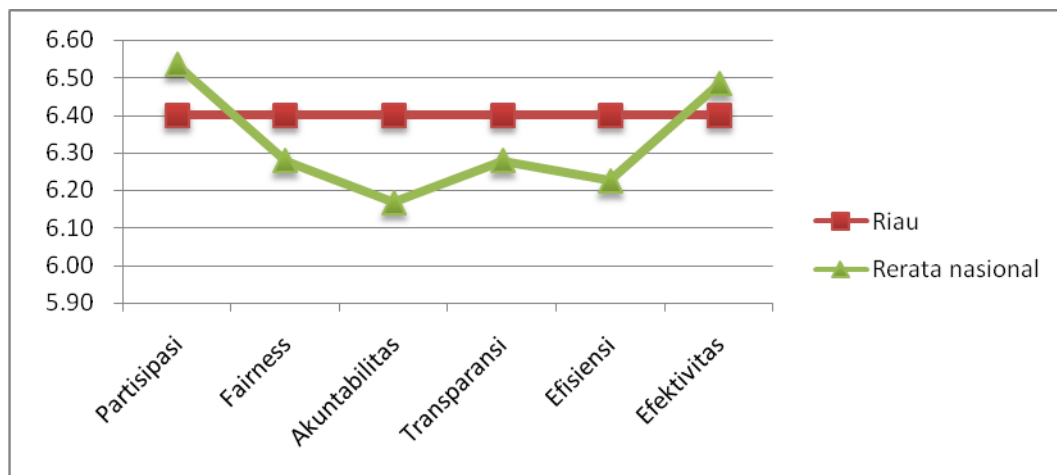
Tabel 2.3. Indikator Partisipasi di Arena Birokrasi

No	Indikator	Riau	Rerata Nasional
1.	Ada tidaknya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di Dispenda provinsi	6.40	3.67
2.	Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.	1.00	3.42
3.	Keberadaan dewan kesehatan, dewan pendidikan, dan dewan pengentasan kemiskinan.	10.00	5.00
4.	Ada tidaknya forum reguler antara pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memperkuat iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat	10.00	5.09

Tabel 2.3. memperlihatkan bahwa di daerah Riau belum ada unit pelayanan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan, kalau pun itu ada hanya ditemukan di tingkat unit pelaksana teknis. Sedangkan bidang pendidikan dan penanggulangan kemiskinan belum ada Unit pelayanan pengaduan masyarakat. Hasil diskusi kelompok yang lalu juga menginformasikan bahwa partisipasi birokrasi dalam penanggulangan kemiskinan belum maksimal, bahkan terkesan tidak efektif. Dana untuk penanggulangan kemiskinan ada di setiap SKPD tetapi bersifat sektoral dan berupa proyek tanpa koordinasi yang baik dengan SKPD terkait. Hampir semua SKPD memiliki program penanggulangan kemiskinan seperti Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kehutanan, tetapi tidak ada koordinasi antar dinas tersebut. Hal ini yang menyebabkan tingkat partisipasi di arena birokrasi menjadi rendah.

2) Arena Masyarakat Sipil

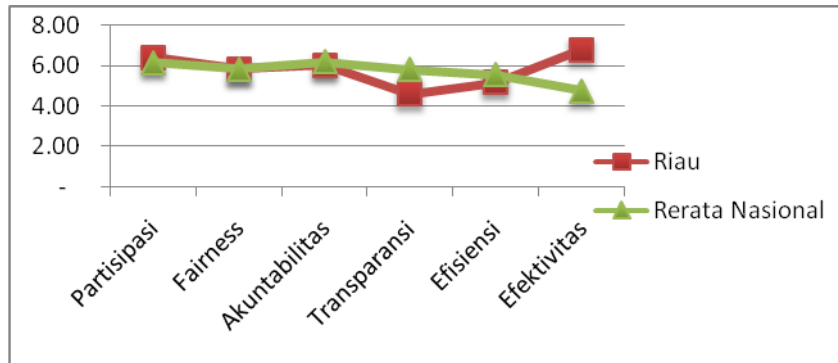
Performance tatakelola pemerintahan pada arena masyarakat sipil memperlihatkan indeks yang relatif stabil pada kategori cenderung baik (6.40) untuk semua prinsip. Kondisi ini agak sedikit berbeda dengan rerata nasional yang cenderung fluktuatif walaupun dengan indeks yang tidak berbeda jauh yakni cenderung baik dengan rerata indeks 6.33. Prinsip yang perlu mendapat perhatian untuk meningkat indeks pada arena ini hampir menyeluruh kepada semua prinsip. Begitu juga indikator yang memberikan pengaruh terhadap kondisi indeks arena masyarakat sipil, hampir semua indikator memiliki nilai yang relatif sama. Secara rinci indeks masyarakat sipil dilihat dari prinsip dapat diperhatikan pada gambar 2.6



Gambar 2.6 Indeks Arena Masyarakat Sipil Menurut Prinsip

3) Arena Masyarakat Ekonomi

Indeks arena masyarakat Ekonomi Riau tidak berbeda signifikan dengan rerata nasional yakni kategori sedang (5.76) sementara indeks rerata nasional adalah 5.72. Prinsip yang perlu mendapat perhatian pada arena ini adalah transparansi dan efisiensi yang nilai indeksnya masing-masing masih tergolong cenderung buruk dan sedang dengan indeks 4.60 dan 5.18 seperti terlihat pada gambar 2.7. Indikator yang menyumbang transparansi di bawah rerata nasional adalah rendahnya indeks Keterbukaan dalam menjalankan fungsi implementasi proyek pemerintah.



Gambar 2.7. Indeks Arena Masyarakat Sipil menurut prinsip

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk menilai penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau, dapat disimpulkan nilai indeks sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap empat arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi kinerja pemerintahan Riau secara keseluruhan tergolong cenderung baik dengan nilai indeks (6.17), angka ini berada di atas rerata nasional (5,67). Sekalipun telah masuk kategori cenderung baik, namun bila dilihat secara nasional Riau harus puas dengan peringkat ke tujuh. Provinsi DIY sebagai daerah dengan indeks tertinggi, memiliki indeks kinerja pemerintahan 6.80, menempatkan DIY pada peringkat pertama.
2. Untuk wilayah Sumatera, Provinsi Riau menempati urutan ketiga setelah Jambi dan Sumatera Selatan. Provinsi terburuk dalam tatakelola pemerintahan di wilayah Sumatera adalah Provinsi Bengkulu dengan indeks 4.77.
3. Posisi Riau secara nasional berada pada urutan ke tujuh dari 33 provinsi di Indonesia. Arena yang mendongkrak posisi Riau tersebut adalah Arena Birokrasi dengan kategori cenderung baik dengan indeks 7.35 dan Arena Masyarakat sipil dengan kualitas cenderung baik dengan indeks 6.40. Sedangkan arena Pemerintah dan masyarakat ekonomi indeksnya masih terpaut dengan indeks rerata nasional dengan kualitas sedang dengan indeks 4.98 hingga 5.74.
4. Kinerja arena pemerintah masih termasuk sedang (indeks = 5.09). Prinsip yang menyebabkan rendahnya kinerja pemerintah adalah fairnes dan akuntabilitas yang termasuk buruk (indeks = 3.33 dan 4.34). Indikator penyebabnya adalah rendahnya alokasi anggaran APBD untuk tiga urusan wajib yaitu:
 - a. Bidang kesehatan non belanja pegawai disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi
 - b. Bidang penanganan kemiskinan per kapita (d disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi)
 - c. Bidang pendidikan di bagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun (d disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi)

5. Kinerja arena birokrasi secara keseluruhan cenderung baik (indeks = 7.24). Prinsip yang masih tergolong sedang (indeks = 5.00) adalah partisipasi. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.

Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan diatas, maka dalam hasil penelitian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Birokrasi sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah perlu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan melalui penyediaan penyediaan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di Dispenda provinsi, di bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
2. Provinsi Riau dengan PDRB/Kapita mencapai Rp 44,154,993.13 mesti mengalokasikan anggarannya lebih besar lagi untuk kesehatan, kemiskinan dan pendidikan dari yang ada saat ini. Alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan juga harus menjadi prioritas pemerintah provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan alokasi anggaran untuk tiga urusan wajib pendidikan, kemiskinan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan (fairnes) di Riau.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas di level pemerintah, perlu didorong kinerja DPRD provinsi Riau agar meningkatkan realisasi pengesahan Ranperda yang tercantum dalam Prolegda menjadi Perda dari 36% menjadi 75%.
4. Masyarakat sipil sampai saat ini sering memposisikan sebagai lembaga yang memberikan advokasi dan monitoring terhadap pemerintah dan birokrasi termasuk secara intens memberikan kritik, namun disisi lain masyarakat sipil juga harus memperkuat kapasitas melalui upaya secara akuntabilitas dengan mempublikasikan laporan kegiatan, keuangan dan hasil monitoring yang dilakukan.
5. Untuk masyarakat ekonomi harus sedapat mungkin melepaskan diri dari ketergantungan pada dana pemerintah. Masyarakat ekonomi perlu mendorong aktifitas bisnis melalui pengembangan usaha-usaha kreatif dan inovatif.

DAFTAR BACAAN

BPS Provinsi Riau Tahun 2012, Riau Dalam Angka,

BPS Provinsi Riau Tahun 2011, PDRB Kabupaten/Kota seprovinsi Riau menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011

BPS Provinsi Riau Tahun 2011, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2011



Kemitraan Parnership, Indonesia Governance Index 2012, Kemitraan
Jakarta 2013

Pemerintah Provinsi Riau , Kumpulan Peraturan Daerah Riau Tahun 2011

Pemerintah Provinsi Riau, Kumpulan Peraturan Gubernur Provinsi Riau
tahun 2011

Pemerintah Provinsi Riau, Perda No 4 Tahun 2011 APBD Perubahan
Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Kepala daerah Provinsi Riau tahun 2011

